

MENUJU PARIWISATA INKLUSIF: STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DESTINASI WISATA DI KABUPATEN BANTUL

Amila Safwah Zahra¹⁾, Anwar Kholid²⁾

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Abstrak

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menekankan hak difabel terhadap akses fasilitas publik, termasuk sektor pariwisata. Kabupaten Bantul memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar namun menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pariwisata inklusif ramah difabel. Banyak penelitian yang telah menyoroti pariwisata inklusif tetapi kebanyakan masih fokus pada aspek umum inklusivitas tanpa mengeksplorasi secara mendalam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Padahal aksesibilitas merupakan fondasi utama untuk menciptakan destinasi wisata yang inklusif dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi-strategi pemerintah Kabupaten Bantul dalam menciptakan pariwisata inklusif berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun telah ada beberapa upaya awal, Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mengembangkan pariwisata inklusif dengan fasilitas aksesibilitas yang belum merata. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran agar Pemerintah Kabupaten Bantul dapat menciptakan fasilitas wisata yang sesuai dengan standar aksesibilitas, adil, inklusif, dan berkelanjutan, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang terletak pada jumlah responden yang masih terbatas sehingga generalisasi sulit dilakukan.

Kata Kunci: Pariwisata inklusif, disabilitas, aksesibilitas, fasilitas wisata

Abstract

Law No. 8 of 2016 concerning persons with disabilities pressures the rights of persons with disabilities on access to public facilities, including the tourism sector. Bantul Regency has great potential for natural and cultural tourism. However, Bantul Regency is able to face challenges in realizing inclusive tourism that is friendly to persons with disabilities. Many studies have highlighted inclusive tourism but most still focus on general aspects of inclusivity in general without exploring in depth accessibility for persons with disabilities, even though accessibility is the main foundation for creating inclusive and socially just tourist destinations. Therefore, this study aims to analyze the strategy of the Bantul Regency government in creating sustainable inclusive tourism. This study uses a qualitative descriptive method, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The results of this study indicate that Bantul Regency has not fully developed inclusive tourism, with accessibility facilities that are not evenly distributed across all tourist destinations, although there have been some initial efforts. Therefore, this study provides suggestions so that the Bantul Regency Government can create tourism facilities that

are in accordance with accessibility standards, fair, inclusive, and sustainable, in accordance with Law No. 8 of 2016. This study has limitations that lie in the number of respondents which are still limited.

Keywords: Inclusive Tourism, Disability, Accessibility, Tourism Facilities

PENDAHULUAN

Secara global, pengembangan pariwisata yang inklusif merupakan bagian dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Asy'ari & Putra, 2023; Hakim et al., 2024; Bachri, 2024; Rahayu & Saragih, 2022; Rokhlinasari & Widagdo, 2022). Konsep pariwisata inklusif hadir dengan menekankan aksesibilitas universal, partisipasi masyarakat, keberlanjutan sosial dan ekonomi, serta pemanfaatan teknologi dan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan (UNWTO, 2018). Di Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menjadi landasan pemerintah dan pihak swasta untuk menyediakan fasilitas-fasilitas ramah difabel sehingga dapat mendukung pembangunan pariwisata inklusif (Arsy, 2024). Berdasarkan regulasi tersebut, penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan, keadilan, serta akses yang setara terhadap berbagai fasilitas pendukung (Mandini, 2020).

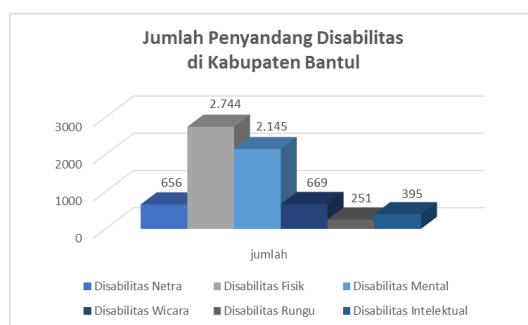
Banyak daerah di Indonesia telah berusaha mewujudkan pariwisata inklusif melalui pemenuhan fasilitas-fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas (Maftuhin, 2017; Rifdah & Kusdiwanggo, 2024) . Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu daerah yang telah berusaha mengembangkan daerah inklusif (Astri et al., 2019). Setiawan, et al (2023) menjelaskan bahwa pariwisata inklusif menjadi salah satu topik penting yang menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Bantul. Meskipun demikian usaha pengembangan daerah inklusif di Bantul masih belum berjalan maksimal karena belum menjadi skala prioritas pembangunan daerah (Susanto et al., 2024).

Kabupaten Bantul memiliki potensi wisata yang sangat besar dengan lebih dari 250 destinasi wisata (Widiyastuti et al., 2023). Menurut data dari

tvonenews.com (2025), sebanyak delapan destinasi dikelola langsung oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata yaitu Pantai Parangtritis, Pantai Depok, Pantai Baru, Pantai Kuwaru, Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Goa Selarong, dan Goa Cerme. Pada Januari 2025, destinasi-destinasi wisata ini telah dikunjungi sebanyak 232.802 orang. Kunjungan wisata ke suatu daerah tidak hanya didominasi oleh wisatawan domestik, tetapi juga melibatkan wisatawan mancanegara yang turut tertarik pada keindahan dan potensi pariwisata Indonesia (Tholhah & Alamari, 2022). Namun, Kabupaten Bantul masih menghadapi kendala dalam menyediakan aksesibilitas destinasi wisata ramah difabel seperti ramp dan jalur khusus. Padahal aksesibilitas merupakan indikator utama dalam keberhasilan pengembangan destinasi wisata inklusif (Wulandari, 2017).

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul menempati urutan teratas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Astri et al., 2019). Data jumlah penyandang disabilitas dapat dilihat pada gambar 1. Melihat data penyandang disabilitas ini, pariwisata inklusif seharusnya masuk ke dalam skala prioritas yang penting. Tingginya jumlah penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Bantul ini dapat dijadikan acuan dalam menciptakan fasilitas yang lebih aksesibel di destinasi wisata guna mewujudkan pariwisata inklusif.

Gambar 1. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul



Sumber: <https://jogjapolitan.harianjogja.com>

Banyak penelitian yang telah membahas pentingnya pariwisata inklusif sebagai upaya untuk menjamin akses yang setara bagi penyandang

disabilitas dalam menikmati aktivitas wisata (Ndaumanu, 2020; Gole et al., 2025; Sholihah, 2016; Tan & Hasibuan, 2019; Suphia, 2021). Penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik, seringkali mengalami hambatan dalam partisipasi sosial (Purnomosidi, 2017; Arrivanissa, 2023; Subroto & Muktya, 2024; Priyambodo & Ubaidillah, 2025). Namun penelitian mengenai pengembangan pariwisata inklusif dengan lokasi di Bantul masih terbatas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mendukung pariwisata inklusif dan keberlanjutan. Penelitian ini juga mengeksplorasi strategi-strategi yang telah diambil oleh pemerintah dalam mewujudkan aksesibilitas destinasi wisata di Bantul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong bagi pemerintah untuk dapat menjadikan pariwisata inklusif sebagai sebuah prioritas Pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti hanya berfokus pada delapan destinasi wisata yang secara resmi dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu Pantai Parangtritis, Pantai Depok, Pantai Baru, Pantai Kuwaru, Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Goa Selarong, dan Goa Cerme.

Teknik penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan tiga langkah. Pertama, studi pustaka dilakukan dengan menganalisis artikel dan referensi terkait pariwisata inklusif ramah difabel. Kedua, wawancara dilakukan dengan narasumber-narasumber yang memiliki kopetensi yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu dari perwakilan Bappeda Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, kelompok disabilitas, dan perwakilan dari SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel). Narasumber memberikan informasi mengenai kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pengembangan kota inklusif, khususnya mengenai fasilitas ramah difabel di

destinasi wisata Kabupaten Bantul. Hasil wawancara kemudian ditranskripsikan untuk mempermudah proses pengolahan data. Ketiga, observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan untuk mengumpulkan data dan mendokumentasikan hal-hal terkait penelitian.

Dalam artikel ini nama narasumber tidak disebutkan karena permintaan dari beberapa narasumber. Wawancara dan observasi dilakukan pada bulan Desember 2024 sampai dengan bulan April 2025.

PEMBAHASAN

Kabupaten Bantul, sebagai salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki kekayaan sumber daya alam, sosial, dan budaya yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata (Widiyastuti, et al., 2023). Dengan potensi beragam, Kabupaten Bantul diharapkan dapat secara optimal mendukung pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai destinasi wisata utama di Indonesia. Hal ini sejalan dengan peran pariwisata yang tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga mendorong kemajuan sosial dan budaya serta memperkuat citra daerah sebagai tujuan wisata yang menarik (Kurniati et al., 2023). Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mencatat bahwa tiga destinasi wisata di wilayah tersebut masuk dalam tiga besar destinasi dengan jumlah pengunjung terbanyak di DIY pada tahun 2018, salah satunya adalah Pantai Parangtritis yang menduduki peringkat pertama dengan jumlah pengunjung sebanyak 2.771.766, kawasan hutan pinus di peringkat kedua dengan jumlah pengunjung sebanyak 2.279.119 dan kawasan Pantai Baron-Pok Tunggal di peringkat ketiga dengan jumlah pengunjung sebanyak 2.224.656 (Anggiyani, 2021).

Dari banyaknya destinasi wisata di Kabupaten Bantul, hanya 8 Destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu Pantai Parangtritis, Pantai Depok, Pantai Baru, Pantai Kuwaru, Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Goa Selarong, dan Goa Cerme. Destinasi wisata tersebut

menarik banyak pengunjung. Selama bulan Januari 2025, destinasi wisata di Kabupaten Bantul yang dikelola Dinas Pariwisata dikunjungi sebanyak 232.802 orang. Pantai Parangtritis menjadi destinasi wisata paling populer dengan 204.092 pengunjung, Pantai Samas dengan 16.012 wisatawan, Pantai Goa Cemara dengan 2.235 wisatawan, Pantai Kuwaru 1.747 wisatawan, Goa Selarong 1.096 wisatawan, dan Goa Cerme hanya 152 wisatawan.

Gambar 2. Jumlah Pengunjung Destinasi Wisata Kabupaten Bantul



Sumber: <https://jogja.tribunnews.com>

Regulasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan di Kabupaten Bantul telah diatur dalam berbagai kebijakan untuk memastikan inklusivitas. Salah satunya adalah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2021 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 juga menekankan pentingnya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan menjadikan Bantul sebagai kabupaten yang layak bagi anak, perempuan, lansia, dan difabel. Di tingkat lokal, diterapkan Kebijakan Kalurahan Inklusi, yang didukung dengan peraturan lurah serta dokumen perencanaan yang mengintegrasikan isu disabilitas, seperti RPJMKal dan RKPKal.

Aksesibilitas Universal

Aksesibilitas yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan pariwisata, karena kemudahan dan kenyamanan menuju destinasi akan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan (Syabella & Muljanto, 2025). Selain itu, aksesibilitas juga dipandang sebagai hak asasi manusia sekaligus peluang ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata secara inklusif (Chadijah & Wardhani, 2021). Standar aksesibilitas universal menurut UNWTO (2018) untuk fasilitas disabilitas di destinasi wisata menekankan pada desain universal yang dapat digunakan semua orang tanpa adaptasi khusus. Standar ini didasarkan pada 7 prinsip, termasuk penggunaan yang adil, fleksibilitas, kesederhanaan, informasi yang mudah dipahami, toleransi terhadap kesalahan, upaya fisik rendah, dan ruang yang memadai. Implementasinya mencakup seluruh rantai pariwisata: lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan layanan. Tujuannya adalah memastikan partisipasi penuh dan setara dalam masyarakat, mencakup semua orang termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga dengan anak kecil. Elemen infrastruktur yang dibutuhkan termasuk area parkir khusus, titik bongkar muat, jalan akses, ramp, toilet yang dapat diakses, telepon, loket informasi, dan sistem reservasi yang mudah diakses. Selain itu, standar juga mencakup akomodasi yang wajar, penghapusan diskriminasi, dan melakukan pelatihan staf. Aksesibilitas dan fasilitas pendukung ini berkaitan erat dengan infrastruktur dasar seperti jalan, tempat ibadah, sentra UMKM, dan fasilitas umum lainnya yang berperan penting dalam menunjang pengalaman wisatawan (Basyari et al., 2023).

Gambar 3. Konblok di Area Parangtritis untuk memudahkan pengguna kursi roda



Sumber: Oleh Peneliti

Beberapa fasilitas pariwisata yang ramah bagi penyandang disabilitas telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, salah satunya adalah jalur pejalan kaki yang sudah menggunakan konblok di seluruh destinasi wisata untuk memudahkan pengguna kursi roda seperti terlihat pada gambar 3. Selain di area Parangtritis, fasilitas ramah difabel seperti parkir khusus difabel dengan permukaan halus dan toilet khusus difabel juga telah tersedia di Laguna Depok seperti terlihat pada gambar 4. Fasilitas tersebut menunjukkan upaya awal pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas pada destinasi wisata di Kabupaten Bantul.

Namun, fasilitas tersebut belum tersedia di seluruh destinasi wisata, sehingga masih banyak tempat wisata yang belum ramah bagi penyandang disabilitas karena belum memenuhi standar aksesibilitas universal. Fasilitas penting seperti ramp dan toilet khusus difabel belum tersedia secara merata di destinasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul seperti di Pantai Baru, Pantai Kuwaru, Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Goa Selarong, dan Goa Cerme. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan aksesibilitas universal perlu terus ditingkatkan agar semua individu

termasuk penyandang disabilitas dapat menikmati destinasi wisata secara optimal.

Wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan pengelihatan terungkap bahwa fasilitas bagi penyandang disabilitas di tempat-tempat tersebut masih sangat minim. Narasumber ini pernah mengunjungi beberapa destinasi wisata berbasis alam di Kabupaten Bantul yaitu Pantai Parangtritis, Goa Selarong, Mangunan, dan Puncak Sosok. Narasumber mengatakan tidak menemukan fasilitas khusus seperti jalur ramp, toilet ramah difabel, atau tempat ibadah yang mudah di akses sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para difabel. Narasumber menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur, seperti penyediaan jalur akses yang aman dan nyaman, khususnya tempat-tempat yang memiliki banyak tangga seperti Goa Selarong. Narasumber juga berharap ke depan fasilitas wisata di Kabupaten Bantul bisa lebih inklusif, termasuk adanya petugas yang siap membantu, sehingga wisata dapat dinikmati secara merata oleh semua kalangan.

Wawancara dengan penyandang disabilitas dalam kategori difabel fisik tanpa alat bantu mengatakan bahwa meskipun terdapat fasilitas dasar seperti ramp atau jalan datar yang memudahkan kursi roda, namun fasilitas lainnya masih sangat terbatas. Narasumber mengatakan bahwa fasilitas seperti toilet khusus disabilitas dan jalur akses dari parkiran ke lokasi wisata belum tersedia secara layak. Menurut narasumber, Kabupaten Bantul belum cukup untuk menciptakan pengalaman wisata yang inklusif. Narasumber berharap seluruh destinasi wisata di Kabupaten Bantul dapat menyediakan akses jalan yang layak, toilet umum yang inklusif, dan area parkir yang sesuai standar untuk difabel.

Wawancara dengan penyandang disabilitas dalam kategori difabel fisik tanpa alat bantu dari perwakilan SIGAB menjelaskan bahwa Aksesibilitas destinasi wisata di Kabupaten Bantul bagi penyandang disabilitas masih

memerlukan perhatian serius. Secara keseluruhan, sebagian besar destinasi wisata di Kabupaten Bantul belum dilengkapi dengan sarana pendukung seperti toilet khusus disabilitas, ramp yang aman, dan jalur akses yang sesuai standar. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih sistematis dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas serta ketersediaan infrastruktur yang mendukung inklusivitas di sektor pariwisata. Harapannya, pembangunan ke depan mampu menerapkan prinsip-prinsip universal design sehingga seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati fasilitas wisata secara setara dan tanpa hambatan.

Gambar 4. Toilet Ramah Difabel di Laguna Depok



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Ada kendala yang menyebabkan penyebaran fasilitas ramah difabel belum merata. Pertama, keterbatasan anggaran APBD menjadi kendala utama. Untuk saat ini anggaran APBD dialokasikan pada isu-isu strategis lainnya, seperti untuk pengelolaan sampah dan penanganan stunting yang menjadi isu prioritas Pemerintah Kabupaten Bantul. Kedua, kesadaran masyarakat dan pelaku industri pariwisata terhadap pentingnya fasilitas ramah difabel juga masih rendah. Hal ini menjadi salah satu faktor hambatan. Rendahnya kesadaran ini berakibat pada rendahnya perhatian pada pemenuhan hak. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan pariwisata inklusif (Khalim & Hernawati, 2024). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mengacu pada sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam memberikan masukan dan ide untuk merancang serta menetapkan program pembangunan (Nopiansyah et al., 2019). Namun demikian, menurut Setiawan, et al (2023) partisipasi masyarakat dalam menciptakan pariwisata inklusif di Kabupaten Bantul masih terbatas. Meskipun terdapat Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut, pemahaman masyarakat tentang pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum merata. Oleh karena itu, sosialisasi lebih lanjut perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan mendukung implementasi fasilitas inklusif di lingkungan wisata.

Hasil wawancara dengan narasumber dari Bappeda Kabupaten Bantul mengatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah mengenai pariwisata inklusif masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut maka upaya sosialisasi tentang pentingnya pariwisata inklusif perlu dilakukan di tingkat kalurahan dan kecamatan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui FGD sehingga dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat.

Hasil wawancara dengan penyandang disabilitas dalam kategori difabel fisik tanpa alat bantu dari perwakilan SIGAB mengatakan Tingkat kesadaran pemangku kepentingan wisata di Kabupaten Bantul, baik dari kalangan pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, terhadap pentingnya pariwisata inklusif dinilai masih kurang optimal. Meskipun terdapat kebijakan dari Bupati Bantul yang mendukung pembangunan wisata yang inklusif, implementasi di lapangan belum sepenuhnya terwujud dan masih memerlukan pengawalan yang ketat.

Pemerintah Kabupaten Bantul dapat meningkatkan partisipasi melalui sosialisasi yang lebih intensif dan FGD yang melibatkan komunitas difabel.

FGD ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menggali permasalahan dan solusi terkait aksesibilitas, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Langkah ini juga dapat memperkuat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas difabel.

Selain itu, pelatihan khusus bagi masyarakat lokal dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Melalui pelatihan, masyarakat dapat diajarkan tentang cara mendukung dan berperan aktif dalam pembangunan fasilitas ramah difabel khususnya di destinasi wisata. Dengan demikian, pengembangan wisata yang inklusif dapat meningkat secara signifikan.

Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi

Pengembangan pariwisata telah menjadi salah satu komponen kunci dalam pertumbuhan ekonomi global, terutama dalam konteks pendorong ekonomi berkelanjutan (Mustaqim, 2023). Pertumbuhan ekonomi daerah terjadi seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan yang melakukan aktivitas rekreasi, sehingga destinasi pariwisata perlu memenuhi berbagai kebutuhan wisatawan melalui penyediaan fasilitas dan layanan yang memadai (Pernamawati et al., 2025). Untuk mewujudkan pariwisata inklusif di Kabupaten Bantul, diperlukan berbagai program yang mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi kaum difabel. Salah satunya adalah program Desa Kreatif yang meliputi pelatihan ekonomi kreatif, seperti kuliner, kerajinan, dan batik, dapat memberikan peluang bagi kaum difabel untuk berperan aktif dalam industri pariwisata. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber dari Bappeda Bantul. Program desa kreatif dirancang sebagai bentuk pendampingan bagi kaum difabel, khususnya melalui kegiatan yang berbasis ekonomi kreatif.

Sinergi antara ekonomi kreatif dan pariwisata ini diharapkan dapat menghasilkan produk-produk khas yang tidak hanya meningkatkan

kesejahteraan kaum difabel, tetapi juga memperkaya pengalaman wisatawan. Pemerintah Kabupaten Bantul berencana untuk mengembangkan kalurahan inklusif yang menjadi wadah pemberdayaan kaum difabel dalam pengembangan pariwisata daerah. Pemberdayaan di tingkat kelurahan ini akan menciptakan peluang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembangunan wisata, baik dalam produksi barang kreatif maupun pelayanan pariwisata. Dengan adanya program pemberdayaan dan fasilitas ramah difabel yang terus ditingkatkan, Kabupaten Bantul dapat menjadi contoh dalam menciptakan pariwisata inklusif dan berkelanjutan.

Keberlanjutan program ini dapat didukung dengan bantuan sosial terpadu yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Bantul setiap tahunnya, meskipun anggaran program ini masih berubah-ubah. Bantuan ini menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kaum difabel untuk berkembang, sehingga tercipta destinasi wisata yang tidak hanya ramah bagi wisatawan, tetapi juga memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berperan dalam industri pariwisata.

Kesadaran dan Pendidikan

Kesadaran dan pendidikan bagi kaum difabel menjadi faktor penting dalam mewujudkan fasilitas ramah difabel di destinasi wisata (Ndaumanu, 2020). Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah, melalui Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian, telah mengadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kaum difabel, seperti membatik dan kerajinan tangan. Selain itu, upaya pemasaran juga dilakukan dengan melibatkan mereka dalam berbagai pameran, seperti Bantul Kreatif Expo dan pameran di Malioboro Mall.

Namun, partisipasi kaum difabel dalam pelatihan dan program pemberdayaan masih tergolong rendah. Banyak di antara mereka yang

merasa kurang percaya diri atau ragu untuk mengikuti pelatihan dan memasarkan produk mereka. Rendahnya motivasi ini menjadi tantangan dalam meningkatkan keterlibatan kaum difabel dalam industri kreatif yang mendukung pariwisata. Oleh karena itu, selain pelatihan teknis, diperlukan pendekatan psikologis dan sosial untuk mendorong mereka agar lebih aktif dalam mengembangkan keterampilan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan kaum difabel, diperlukan strategi yang lebih menyeluruh, seperti program sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan. Pemerintah dan komunitas dapat bekerja sama dalam memberikan dukungan mental, pelatihan kewirausahaan, serta akses informasi yang lebih luas mengenai kesempatan kerja di sektor pariwisata. Dengan demikian, fasilitas ramah difabel di destinasi wisata tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberdayakan kaum difabel sebagai bagian dari ekosistem wisata yang berkelanjutan.

Peran Teknologi

Pemanfaatan teknologi serta informasi merupakan aspek penting (Tokan et al., 2020). Dalam hal ini dapat mendukung terwujudnya fasilitas ramah difabel di destinasi wisata, terutama melalui media sosial dan platform digital (Shanti et al., 2025). Pemerintah daerah dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarluaskan informasi mengenai fasilitas yang tersedia, program bantuan, serta kebijakan inklusif bagi kaum difabel. Dengan publikasi yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami kebutuhan penyandang disabilitas dan turut serta dalam menciptakan lingkungan wisata yang lebih aksesibel.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengupayakan pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait fasilitas ramah difabel. Melalui media sosial, berbagai bentuk bantuan dari

stakeholder atau pihak lain dapat dipublikasikan secara luas, sehingga masyarakat mengetahui adanya dukungan bagi kaum difabel. Dengan cara ini, diharapkan lebih banyak pihak yang terdorong untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aksesibel.

Kolaborasi Antar Stakeholder

Dalam proses perencanaan dan implementasi untuk menuju pariwisata inklusif di Bantul, perlu melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, perguruan tinggi, dan komunitas difabel. Tahapan ini sudah dimulai dengan identifikasi kebutuhan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama komunitas difabel, seperti Difabel Zona Indonesia, SIGAB, dan Rehabilitasi Yakum, untuk memahami kebutuhan mereka secara lebih mendalam. Pihak swasta turut berkontribusi melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), misalnya dengan menyediakan kursi roda serta membangun fasilitas pendukung seperti ramp tangga dan toilet khusus. Untuk membantu dalam perencanaan dan implementasi. Pemerintah daerah bisa melakukan sosialisasi di tingkat kalurahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fasilitas yang inklusif bagi difabel.

Kolaborasi antar stakeholder terkait dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk memastikan adanya kesetaraan dalam menikmati fasilitas pariwisata. Implementasi kolaborasi ini dapat dilakukan secara bertahap, serta keberhasilan suatu kolaborasi bergantung pada adanya prinsip-prinsip dasar yang dipahami oleh semua pihak atau pemangku kepentingan, sehingga setiap pihak mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam menjalankan kolaborasi sesuai kesepakatan bersama (Sukanti & Faidati, 2021). Melalui pembangunan fasilitas toilet khusus difabel di semua destinasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah. Selain itu, pembangunan ramp tangga, jalur pejalan kaki yang ramah difabel, dan area parkir khusus juga dapat dibangun

secara kolaboratif. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aksesibel dan nyaman bagi semua pengunjung.

Beberapa fasilitas ini memang sudah diterapkan seperti di kantor pemerintahan, pasar, dan taman yang ada di Kabupaten Bantul tetapi masih perlu diperluas ke lebih banyak objek destinasi wisata. Dengan perencanaan yang matang dan penerapan bertahap, Kabupaten Bantul dapat menjadi contoh destinasi wisata inklusif yang mendukung aksesibilitas bagi semua pengunjung.

KESIMPULAN

Kabupaten Bantul memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata inklusif yang ramah bagi penyandang disabilitas. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas fasilitas wisata, kesadaran masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Meskipun beberapa fasilitas ramah difabel telah disediakan, seperti yang memudahkan pengguna kursi roda dan toilet khusus difabel, tetapi pembangunan fasilitas ini belum merata di semua destinasi wisata. Oleh karena itu pemerataan fasilitas ramah difabel seperti ramp, toilet khusus difabel, dan area parkir yang mudah diakses perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas difabel menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Program CSR dari pihak swasta, penelitian dari perguruan tinggi, serta sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat lokal dapat mendorong terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan intensif bagi masyarakat dan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya fasilitas inklusif. Pemanfaatan teknologi, terutama media sosial, juga dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan dan mempublikasikan program-program bantuan serta fasilitas yang tersedia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Bantul dapat menjadi contoh destinasi wisata inklusif yang mendukung kesetaraan akses dan kesejahteraan bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. H., Suprihatiningrum, J., & Aminah, S. (2019). Persepsi Penyandang Disabilitas dan Stakeholder untuk Mempromosikan dan Mengembangkan Komunitas Inklusif di DIY dan Sulawesi Tenggara. *Sosiologi Reflektif*, 13(2), 379-404. <https://ejurnal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/132-10>

- Agustin, V. M., Subandi, Y., Wiratma, H. D., & Nurgiyanti, T. (2023). Implementasi Ratifikasi CRPD dalam Bidang Pariwisata di Yogyakarta (Studi Kasus: Walking-Walking Tour Organizer). *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(6), 422-432.
- Anggiyani, H. E. (2021). Sinergi Badan Promosi Pariwisata dan Akun Instagram Explore Bantul dalam Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 17(2), 41-55. Doi: <https://doi.org/10.53691/jpi.v17i2.253>
- Arrivanissa, D. S. (2023). Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 2(1), 39-58. Doi: <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6080>
- Arsy, Y. Y. (2024). Analisis Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kewajiban Orang Tua Disabilitas dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 60-79. Doi: <http://dx.doi.org/10.62870/qanun.v2i1.24803>
- Asy'ari, R., & Putra, R. R. (2023). Bibliometric: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Socius: Jurnal of Sociology Research and Education*, 10(1), 19-30. Doi: <https://doi.org/10.24036/scs.v10i1.423>
- Bachri, B. (2024). Peran Hospitality Industry Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Khasanah Ilmu : Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 15(2), 1-9. Doi: 10.31294/khi.v15i2.25152
- Basyari, M. S., Rohayatin, T., & Abidin, Z. (2023). Penerapan City Branding Dalam Mewujudkan Heritage Military Tourism di Kota Cimahi. *Jurnal Caraka Prabu*, 7(1)114-136. Doi: <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i1.1022>
- Chadijah, S., & Wardhani, D. K. (2021). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Desa Jagabaya, Kabupaten Lebak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 410-415.
- Gole, E. D., Hasanah, E. L., & Pratiwi, W. D. (2025). Perencanaan Aksebilitas Pelayanan Bandung Tour On Bus guna Mendukung Pariwisata Inklusif di Kota Bandung. *Jurnal Darma Agung*, 33(1), 478-490. Doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v33i1.5497>
- Hakim, A., Rahmani, N. A., & Harahap, R. D. (2024). Peran Pemerintah Dalam Program Pariwisata Berkelanjutan Dalam Upaya Mewujudkan Sustainabel Development Goals (SDGs) di Kawasan Danau Toba. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 1-15. Doi: <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1434>

- Khalim, A., & Hernawati, Y. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kampung Arab Panjunan Kota Cirebon. *eCo-Buss*, 7(1), 435-477.
- Kurniati, P. S., Zakiyani, S. N., Yuwono, F. A., & Munigar, W. (2023). Kebijakan Pemerintahan Dalam Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata di Wilayah Kota Bandung. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 1-16. Doi: <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1723>
- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator. *Tata Loka*, 19(2), 93-103. Doi: 10.14710/tataloka.19.2.93-103
- Mustaqim, D. A. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, 1(1), 26-43.
- Mandini, D. D. (2020). Pro dan Kontra Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Caraka Prabu*, 4(2), 164-174. Doi: <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.284>
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintahan Daerah. *Jurnal HAM*, 11(1), 131-150. Doi: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Nopiansyah, P., Setiawan, A., & Kurnia, D. (2019). Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Ekonomi di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Caraka Prabu*, 3(2), 184-206. Doi: <https://doi.org/10.36859/jcp.v3i2.357>
- Priyambodo, A. R., & Ubaidillah, L. (2025). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember. *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 1-15. DOI: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1013>
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1-14. Doi: <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>
- Pernamawati, N., Muzdalifah, S., & Nofiard, F. (2025). Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implikasinya Pada Pembangunan Ekonomi Rural Dalam Pembangunan Desa Wisata Kelurahan Kuin Utara Banjarmasin. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 1-25. Doi: <https://doi.org/10.36859/jcp.v9i1.3541>
- Rahayu, S., & Saragih, M. G. (2022). *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. Medan: Penerbit CV Tungga Esti.

- Rifdah, B. N., & Kusdiwanggo, S. (2024). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* 13 (2), 75-85. DOI <http://doi.org/10.32315/jlbi.v13i2.358>
- Rokhlinasari, S., & Widagdo, R. (2022). *Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan dalam Mewujudkan SDGs, dan Maqashid Syariah*. Cirebon: CV. Elsi Pro.
- Setiawan, D. F., Maula, D. I., Nuryani, T., Ariyani, A. D., & Layli, M. (2023). Restruktur Sistem dan Tata Kelola Wisata Melalui Pendekatan Desa Wisata dan Community Based Tourism Kabupaten Bantul. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(2), 1737-1754. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i2.13967>
- Shanti, N. D., Lukman, J. P., & Yudartha, I. D. (2025). Strategi Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Graha Nawasena (Rumah Harapan Disabilitas) di Kota Denpasar. *Socio-political Communication and Policy Review*, 2(2), 1-15.
- Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas. *Sosio Informa*, 2(2), 166-184. Doi: <https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256>
- Subroto, M., & Muktya, Y. D. (2024). Aksesibilitas Fisik Dan Sosial Bagi Narapidana Disabilitas Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4(5), 8163-8174. Doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15567>
- Suphia. (2021). Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *JURNAL RECHTENS*, 10(1), 91-108. Doi: <https://doi.org/10.36835/rechtens.v10i1.1022>
- Susanto, H., Yunanto, M. K., & Ediyo, S. (2024). Efektivitas Program Perencanaan Pembangunan Desa Digital (Studi Kasus di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 21-34. DOI: <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i1.3718>
- Syabella, V. A., & Muljanto, M. A. (2025). Pengembangan Objek Wisata Oleh Pokdarwis Kencana Pada Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 64-82. Doi: <https://doi.org/10.36859/jcp.v9i1.3645>
- Sukanti, & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman. *Jurnal Caraka Prabu*, 5(1), 91-113. Doi: <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.418>
- Tan, W., & Hasibuan, A. P. (2019). Pemenuhan Hak Kebudayaan dan Kepariwisataan Wisatwan Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam.

Journal of Judicial Review, 21(2), 145-167. DOI:
<https://doi.org/10.37253/jjr.v21i2.675>

Tholhah, & Alamari, M. F. (2022). Strategi Peningkatan Wisatawan Asing di Kota Cimahi Pada Tahun 2023. *Jurnal Caraka Prabu*, 6(1), 123-137. Doi: <https://doi.org/10.36859/jcp.v6i1.1048>

Tokan, F. B., Gai, A., & Negong, Y. (2020). Partisipasi Politik Perempuan (Studi Tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan Dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabu*, 4(2), 206-225. Doi: <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>

UNWTO. (2018). *Global Report Inclusive Tourism Destinations Model and Succes Stories*. Madrid, Spayol: United Nations World Tourism Organizatio.

Widiyastuti, D., Azmi, F. N., Adhitama, S. Y., Destiana, K., Dahlan, A. D., Syakbana, Z. P., Almasari, H. (2023). Analisis Tingkat Perkembangan Destinasi Wisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Compact: Spatial Development Journal*, 1-14. DOI: <https://doi.org/10.35718/compact.v2i1.851>

Wulandari, R. (2017). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Menghadapi Bencana Gempa Bumi. *Jurnal Prodi Manajemen Bencana*, 3(1), 23-41. <https://core.ac.uk/download/pdf/288021847.pdf>